

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

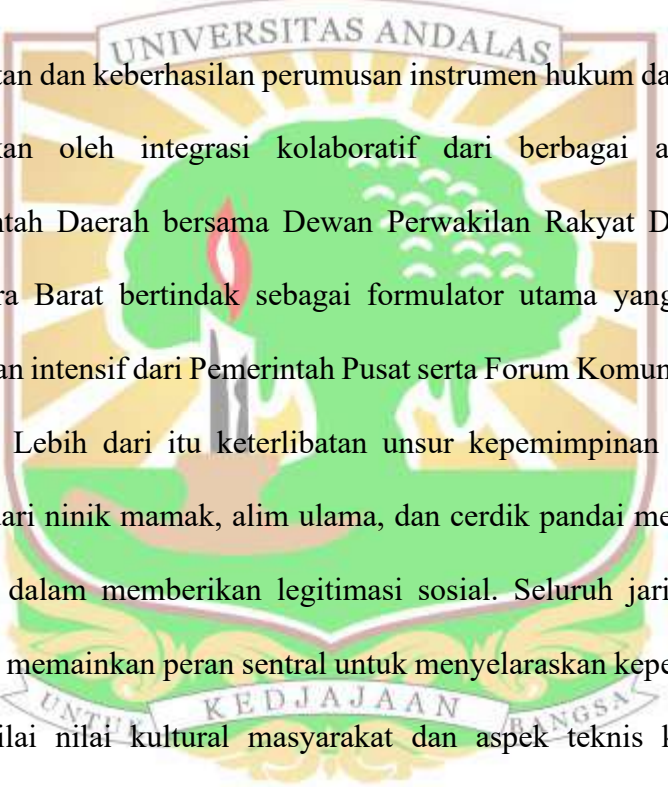
Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya kesimpulan dari disertasi ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama. Ketiga fokus tersebut mencakup mekanisme difusi kebijakan di masa darurat, dinamika jaringan aktor yang terlibat, serta manfaat empiris dari produk hukum yang dihasilkan. Kesimpulan ini sekaligus menjelaskan sintesis teoretis yang menyusun paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan pada situasi krisis. Rincian kesimpulan dari penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga poin berikut:

1. Mekanisme Difusi Kebijakan dalam Konteks Kedaruratan

Proses perumusan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru tidak berjalan menggunakan alur difusi yang konvensional melainkan beroperasi melalui mekanisme adaptasi cepat secara hibrida. Pembentukan regulasi ini merupakan hasil dari perpaduan antara mekanisme pembelajaran dan paksaan vertikal yang bersumber dari pedoman Pemerintah Pusat. Provinsi Sumatera Barat merespons tekanan krisis pandemi tersebut dengan melakukan sebuah lompatan kebijakan yang berani, yakni mengubah wujud regulasi lunak seperti imbauan dan surat edaran menjadi instrumen hukum daerah yang tegas dan mengikat. Situasi darurat menuntut daerah untuk segera memiliki payung hukum yang kokoh

guna melegitimasi pemberian sanksi administratif dan pidana kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan. Temuan ini sukses mengembangkan teori difusi kebijakan ke dalam konteks krisis dan tata kelola desentralisasi dengan membuktikan bahwa pada masa genting pembentukan produk legislasi dapat berjalan secara sangat fleksibel dan singkat tanpa harus terbelenggu oleh prosedur birokrasi yang kaku.

2. Dinamika dan Peran Aktor Utama Pembentuk Kebijakan



Kecepatan dan keberhasilan perumusan instrumen hukum darurat ini sangat ditentukan oleh integrasi kolaboratif dari berbagai aktor strategis. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertindak sebagai formulator utama yang mendapatkan dukungan intensif dari Pemerintah Pusat serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Lebih dari itu keterlibatan unsur kepemimpinan informal yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai menjadi kekuatan penting dalam memberikan legitimasi sosial. Seluruh jaringan aktor ini berhasil memainkan peran sentral untuk menyelaraskan kepentingan politik lokal nilai-nilai kultural masyarakat dan aspek teknis ketatanegaraan. Sinergi harmonis lintas aktor inilah yang membuat proses legislasi daerah dapat dipacu secara akseleratif hingga rampung hanya dalam kurun waktu sembilan hari kerja.

3. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru

Difusi regulasi ini memberikan implikasi yang sangat nyata terhadap pemenuhan tujuan filosofis hukum, khususnya pada aspek kepastian dan

kemanfaatan bagi publik. Pengesahan peraturan daerah ini menciptakan standardisasi penanganan dan pengendalian wabah yang mengikat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran aturan ini memberikan dasar legalitas yang terang benderang bagi aparat penegak hukum untuk menertibkan warga menggunakan sanksi yang tegas dan terukur. Di samping itu instrumen kebijakan ini sukses menyatukan gerak langkah pemerintahan kabupaten dan kota ke dalam satu garis komando dan koordinasi penanganan krisis. Secara substansial manfaat tertinggi dari pemberlakuan regulasi ini terwujud pada keberhasilannya mengubah cara berpikir masyarakat serta menumbuhkan kebiasaan pola hidup sehat yang melekat dalam jangka panjang.

B. Saran

1. Aspek Regulasi

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa mendatang sangat disarankan untuk menyusun sebuah rancangan Panduan Legislasi Akseleratif yang menetapkan tata alur koordinasi baku antara struktur di tingkat pusat dan daerah saat menghadapi kondisi darurat. Keberadaan pedoman baku ini menjadi unsur utama yang menjamin agar proses penyebaran kebijakan tidak hanya berfokus pada pengejaran kecepatan pengesahan semata melainkan tetap menjaga ketatnya kualitas harmonisasi hukum. Melalui panduan ini, lompatan regulasi darurat dapat disusun secara rapi sehingga instruksi dari pemerintah pusat selalu selaras dengan kebutuhan spesifik dan kapasitas inovasi birokrasi di wilayah Sumatera Barat.

2. Aspek Kelembagaan

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pelembagaan Forum Komunikasi Lintas Otoritas yang didesain lebih inklusif dalam setiap agenda pembentukan peraturan daerah darurat. Wadah formal ini harus menempatkan representasi kultural Tigo Tungku Sajaringan yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai bersama pakar kesehatan sebagai aktor kunci sejak fase awal perumusan. Keterlibatan aktif dari aktor nonpemerintah ini merupakan unsur utama yang akan memberikan legitimasi sosio-kultural yang kokoh di mata publik. Apabila ruang negosiasi ini dilembagakan secara permanen maka setiap ancaman sanksi dalam regulasi daerah tidak akan lagi dipersepsikan sebagai tindakan represif negara melainkan dihormati sebagai sebuah kesepakatan sosial yang harus dijaga bersama.

3. Aspek Operasional

Dalam ranah eksekusi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk membangun sebuah Sistem Monitoring Kebijakan Terintegrasi berbasis digital yang mampu mensinkronkan data penegakan hukum di sembilan belas kabupaten dan kota. Kehadiran sistem informasi silang wilayah ini menjadi unsur utama untuk mengoptimalkan kemanfaatan dari keseragaman peraturan daerah tentang penanganan krisis di masa datang. Pemanfaatan teknologi ini juga harus dibarengi dengan agenda peningkatan kapasitas para penegak hukum secara berkelanjutan khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai ujung tombak penindakan. Peningkatan kompetensi aparat dipadukan dengan

evaluasi dampak secara berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepatuhan masyarakat bersifat permanen dan bukan sekadar respons sesaat akibat ketakutan terhadap ancaman hukuman semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Akbar Wafa Raniah Putri, Francesca Rachel, Shafa Andien Hanifa. 2022. Efektivitas Program Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Pc- Pen) Ditinjau Dari Ekonomi Pancasila, *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Volume 12, Nomor 02, Desember.
- Anderson, James E. 2015. *Public Policymaking: An Introduction*. Eighth Edition. Stamford: Cengage Learning.
- Arikunto Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta. RINEKA CIPTA.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Difusi Kebijakan Upaya Fundamental Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta. MATRA PEMBARUAN.
- Basyar, Hamdan. 2020. *Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Politik: Melihat Negara Lain Menangani Covid-19*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Berry, Frances Stokes, dan William D. Berry. 1990. "State Lottery Adoptions as Policy Innovations: An Event History Analysis." *American Political Science Review*, 84(2): 395–415.
- Berry, Frances Stokes, dan William D. Berry. 1999. "Innovation and Diffusion Models in Policy Research." Dalam Paul A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press.
- Berry, Frances Stokes. 2023. "Finding Common Ground: Innovation and Diffusion across Political Science and Public Management Research." *PS: Political Science & Politics*, 56(3): 437–443.
- Candradewini, Rohmat Bahtiar, Mohammad Benny Alexandri. 2020. *Difusi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Bandung*. Responsive, Volume 3 No.4 Bulan

Desember, Hal.179-195.

- Canon, B. C., & Baum, L. 1981. Patterns of Adoption of Tort Law Innovations: An Application of Diffusion Theory to Judicial Doctrines. *American Political Science Review*.
- D.M, Selvi.,Et.al. 2020. Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19 “Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19”.
- Deslatte, Aaron, Megan E. Hatch, dan Eric J. Stokan. 2022. “Contagious COVID-19 Policies: Policy Diffusion during Times of Crisis.” *Review of Policy Research*, 39(6): 825–849.
- Dobbin, Frank, Beth Simmons, dan Geoffrey Garrett. 2007. “The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning?” *Annual Review of Sociology*, 33: 449–472.
- Dolowitz, David P., dan David Marsh. 2000. "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." *Governance*, 13(1), 5–23.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Sixth Edition. New York: Routledge.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. Fifteenth Edition. Boston: Pearson.
- Easton, David. 1999. *A System Analysis Of Political Life*. New york: Willey. Elling.
- Edie, Haryoto. dkk. 2020. *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*. Jakarta. RMBOOKS.
- Gilardi, Fabrizio. 2010. “Who Learns from What in Policy Diffusion Processes?” *American Journal of Political Science*, 54(3): 650–666.
- Gilardi, Fabrizio. 2016. “Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research.” *State Politics & Policy Quarterly*, 16(1): 8–21.
- Gray, V. 1973. *Innovation in the States: A Diffusion Study*. *American Political Science Review*.
- Hajarah, M. 2013. Difusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Individu: Refleksi Terhadap Metode Penelitian Difusi.

Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikanm.

Hasani, Ismail. 2020. Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

[https://w.w.w.iakmi.or.id/web/news/detail/16/Pendekatan Pantahelik-Dalam-Tangani-COvid-19-Ala-RM Padang.Penedekatan Pantehelik Dalam Tangani COVID-19 Ala RM Padang,](https://w.w.w.iakmi.or.id/web/news/detail/16/Pendekatan%20Pantehelik-Dalam-Tangani-COvid-19-Ala-RM%20Padang.Penedekatan%20Pantehelik%20Dalam%20Tangani%20COVID-19%20Ala%20RM%20Padang) tanggal 21 Januari 2026.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7310785/>Bani Cakir. COVID-19 di Turki. Pelajaran yang dipetik, tanggal 27 Juni 2025.

Indah Adi Putri dan Tamrin. 2020. Politik Kebijakan Hukum Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat. PERS ATLANTIS/ Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Volume 495

Indraningrum Fitria , Devi Julianti Saragih. 2022. Analisis Kebijakan Penanganan Covid- 19 Di Indonesia: Literatur Review, JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia Vol 1. (1) April.

Indrati S., Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian CORONA Virus Disease 2019

Ismail Hasani. 2020. Pengujian Konstitusionalitas PERDA, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/Kep-Pimp/2020 Tentang Penetapan Susunan pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar Nomor : 19/Kep.Pimp/2020 Tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumbar Masa Jabatan 2019 – 2024

Knill, C. (ed.). 2005. ‘Cross-National Policy Convergence: Concepts, Approaches, and Explanatory Factors’, Journal of European Public Policy.

- Laporan PANSUS. 2020. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Padang. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jum'at, 11 September.
- Makse, T., & Volden, C. 2011. The Role of Policy Attributes in the Diffusion of Innovations. *The Journal of Politics*, 73(1),
- Marsh, David, dan J. C. Sharman. 2009. "Policy Diffusion and Policy Transfer." *Policy Studies*, 30(3): 269–288.
- Mintrom, M. 1997. Policy Entrepreneurs and the Diffusion of Innovation. *American Journal of Political Science*.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mooney, C. Z. 2001. Modeling Regional Effects on State Policy Diffusion. *Political Research Quarterly*.
- Muhammad Faniawan Asriansyah. Pandemi Covid 19 dan Upaya Pencegahan
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>
- Muslih, M. 2017. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas. Jurnal Hukum*, 4(10). Hal.130-152.
- Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat. 2020. Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Notulen Rapat PANSUS. 2020. Rapat Kerja Panitia Khusus Pembahasan RANPERDA Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Padang. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar. Jum'at, 4 September.
- Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi. 2020. Terhadap RANPERDA Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Padang Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jum'at, 11 September.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Nrgara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- Peters, B. Guy. 2021. Advanced Introduction to Public Policy. Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pidato. 2020. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Rapat Paripurna Dengan Acara Pengambilan Keputusan Terhadap RANPERDA Adaptasi Kebiasaan Baru dan Jawaban DPRD. Padang. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jum'at, 11 September.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Rogers, E. M. 1995. *Diffusion of Innovations* (4th ed.). New York: The Free Press.

Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*. Fifth Edition. New York: Free Press.

Shipan, Charles R., dan Craig Volden. 2006. "Bottom-Up Federalism: The Diffusion of Antismoking Policies from U.S. Cities to States." *American Journal of Political Science*, 50(4): 825–843.

Shipan, Charles R., dan Craig Volden. 2008. "The Mechanisms of Policy Diffusion." *American Journal of Political Science*, 52(4): 840–857.

Simmons, Beth A., Frank Dobbin, dan Geoffrey Garrett. 2006. "Introduction: The International Diffusion of Liberalism." *International Organization*, 60(4): 781–810.

Sofwani Ahmad, Sholih Muadi, Ismail MH. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02, Desember.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. ALFABETA. Hal.316-327

Sumatera Barat. 2020. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Walker, J. L. 1969. The Diffusion of Innovations Among The American States. American Political Science Review.

Walker, Jack L. 1969. "The Diffusion of Innovations among the American States." American Political Science Review, 63(3): 880–899.

Yin, R.K. 2009. Case Study Research and Methods. Sage Publication.

